

**ANALISIS YURIDIS URGENSI PENGATURAN TENTANG *DONATION-BASED CROWDFUNDING* DI INDONESIA DALAM RANGKA
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**BINTANG RAHMATULLAH
NIM. 145010107121005**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS URGENSI PENGATURAN TENTANG *DONATION-BASED CROWDFUNDING* DI INDONESIA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM

BINTANG RAHMATULLAH

NIM : 145010107121005

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Oktober 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19830502 200812 1 003

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 19880632 01404 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 24 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Bintang Rahmatullah
NIM 145010107121005



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugrah serta berkat yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya selama proses pengerjaan skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi dan bimbingannya selama proses pengerjaan skripsi penulis.
5. Kedua orangtua saya, Bapak Suratman serta Ibu Lusia Endang Budihandayani yang telah mendukung secara materiil dan formil hingga tahap selesainya skripsi ini. Serta kakak saya tercinta Ekasari Maulidia Rahma atas dukungannya selama ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang saya hormati.
7. Medina Syfa yang terkasih, yang telah memberikan dukungan dan doa hingga tahap ini.
8. Teman-temanku yang terkasih, Muh. Rifky, Aulia, Yoga Agung, Jeaney Dwi Sapt, Jessy & Aviv, Tiffany Ardiati, Pieter Erastus, Raja Koresy dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis hingga tahap ini. Penulis bersyukur tanpa adanya keterlibatanmu penulis tidak akan sampai pada tahap ini.
9. Sahabat Mercusuar, bung Irsyan, Awlia & Rylo, Mbak Yuni, Mas Han dan Mbak Fida

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 Oktober 2018

Bintang Rahmatullah



RINGKASAN

Bintang Rahmatullah, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ANALISIS YURIDIS URGENSI PENGATURAN TENTANG DONATION-BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M.,Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

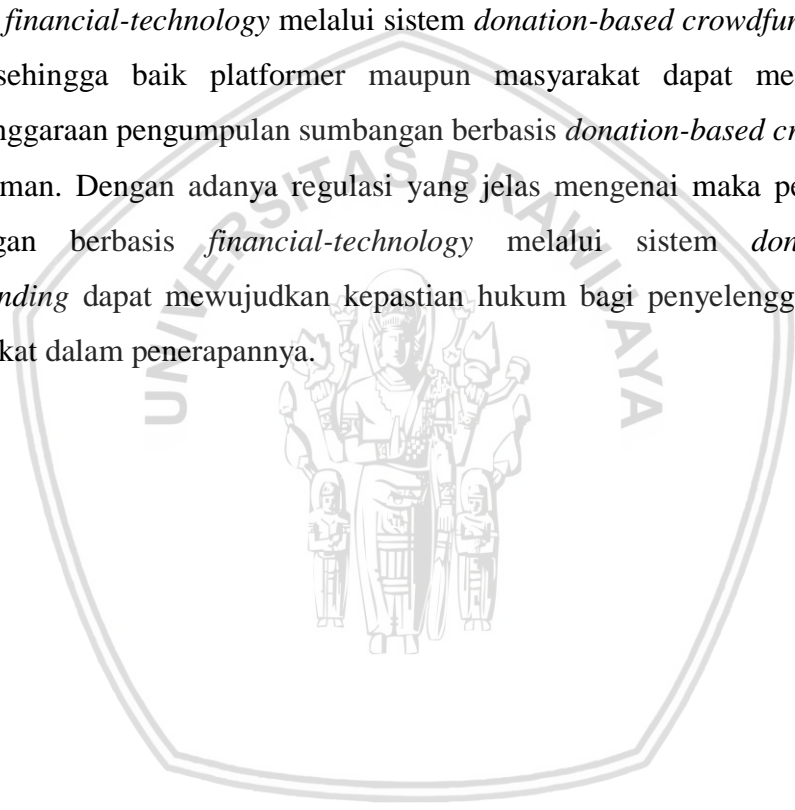
Perkembangan sebuah teknologi adalah hal yang umum, namun dengan perkembangan tersebut, semakin menimbulkan banyak peluang-peluang serta metode baru dalam berbagai bidang. Hukum sebagai ilmu dinamis-pasif, berubah mengikuti perkembangan yang ada dan muncul sebagai solusi dan aturan dalam dinamika yang terjadi dalam perubahan tersebut. Mikrofinansial yang awalnya sekedar cara finansial untuk kalangan ekonomi rendah, telah berkembang pesat seiring dengan teknologi dan berubah menjadi bentuk yang lebih meluas. Crowdfunding yang termasuk terobosan dalam dunia finansial ini terus menjalar kepada seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya kalangan ekonomi rendah saja sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang urgensi regulasi tentang pengumpulan sumbangan melalui sistem *donation-based crowdfunding*. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang ada akan membantu untuk menganalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum yang juga mengatur mengenai pengumpulan sumbangan berbasis *financial-technology* melalui sistem *donation-based crowdfunding*.

Hasil dari penelitian ini diantaranya ialah regulasi pengumpulan sumbangan berbasis sistem *donation-based crowdfunding* sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini ditinjau dari 3 aspek yaitu, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Walaupun telah diatur mengenai hal ini dalam beberapa regulasi, tidak menjamin kepastian hukum bagi pihak berbagai pihak yang terlibat. Adapun regulasi yang telah dibentuk belum menjamin kepastian hukum, karena berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masih terdapat rumusan pasal yang tidak mendeskripsikan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 dan asas tidak mencerminkan asas kepastian hukum pada Pasal 6. Selain regulasi yang telah ada belum konsisten dengan regulasi terkait lainnya, dan regulasi tersebut harusnya adalah rumusan undang-undang yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, maka regulasi mengenai pengumpulan sumbangan berbasis *financial-technology* melalui sistem *donation-based crowdfunding* sangat urgen, sehingga baik platformer maupun masyarakat dapat mengupayakan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berbasis *donation-based crowdfunding* secara aman. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai maka pengumpulan sumbangan berbasis *financial-technology* melalui sistem *donation-based crowdfunding* dapat mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun masyarakat dalam penerapannya.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan.....	v
Summary	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Mikro	16
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Fundraising</i> (Galang Dana).....	18
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i> (FinTech).....	20
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Crowdfunding</i>	23
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Crowdsourcing</i>	25
G. Tinjauan Umum Tentang Platformer atau <i>Crowdfunding</i> Platform	26
H. Tinjauan Umum Tentang Donatur <i>Crowdfunding</i>	27
I. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kementerian Sosial	27
J. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Sumber Bahan Hukum.....	40
E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	40
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
G. Definisi Konseptual	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Mengenai <i>Donation-based Crowdfunding</i> dalam Penghimpunan Dana Sosial yang Berkepastian Hukum	43
1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengumpulan Dana Secara Online	43
2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengumpulan Dana	

Untuk Keperluan Sosial.....	51
2. Analisis Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai <i>Crowdfunding</i> Dengan Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain	55
B. Urgensi Pengaturan Donation-based Crowdfunding di Indonesia.....	60
C. Regulasi Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Melalui Program <i>Donation</i> <i>based Crowdfunding</i>	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Crowdfunding bermula dari sejarah kredit mikro yang dapat ditelusuri kembali sejauh pertengahan tahun 1800-an, ketika Lysander Spooner mengemukakan teori tentang manfaat kredit kecil untuk pengusaha dan petani sebagai cara merentas kemiskinan. Terpisah dari Spooner, di sisi lain Friedrich Wilhelm Raiffeisen mendirikan bank berupa koperasi pertama yang bertujuan untuk mendukung petani di pedesaan Jerman. Penggunaan ungkapan modern "kredit mikro" berakar pada 1970-an ketika organisasi, seperti Grameen Bank dari Bangladesh dengan pelopor keuangan mikro Muhammad Yunus, yang memulai dan membentuk industri modern pembiayaan mikro. Yunus memulai proyeknya di sebuah kota kecil bernama Jobra, dengan menggunakan uangnya dan jaminan diri sendiri ke bank, dia mulai menawarkan kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat miskin¹. Kesuksesan Grameen Bank kemudian diikuti oleh beberapa organisasi seperti BRAC (*Bangladesh Rural Advancement Committee*) di tahun 1972 dan ASA (*Association for Social Advancement*) di tahun 1978 yang kemudian berlanjut di Amerika latin dengan berdirinya PRODEM (*Privat Financial Fund*) di Bolivia pada tahun 1986, sebuah bank yang kemudian bertransformasi menjadi

¹ Muhammad Yunus, *Banker to the Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus, Founder of Grameen Bank*, Oxford University Press, 2001, hlm 23

perusahaan profit bernama BancoSol. Kredit mikro kemudian menjadi sebuah instrument populer dalam pengembangan ekonomi, dengan ratusan perusahaan dan institusi mulai bangkit dari negara-negara berkembang. Meski awalnya Grameen Bank hanya dibentuk sebagai non-profit organization yang bergantung pada subsidi pemerintah, Kemudian berubah menjadi perusahaan profit dengan nama Grameen II pada tahun 2002. Di lain hal, tokoh lain dari mikro kredit adalah Akhtar Hameed Khan dengan Comilla Modelnya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 1959.

Berbicara mengenai mikro kredit, sebuah turunan dari mikro finansial, tidak terlepas dari sebuah perkembangannya menjadi *crowdfunding* populer yang merupakan bentuk lain dari *crowdsourcing*. Pada tahun 1997, sebuah Band rock asal inggris, Marilion, menggalang dana dengan sebutan “*fanfunding*” untuk membiayai tur reuni band mereka dengan menggunakan sarana donasi *online* dari para penggemar mereka, alhasil konser tur mereka sukses besar. “*Fanfunding*” ini adalah satu bentuk contoh *Crowdfunding* terekam pertama yang sukses di dunia. Terinspirasi dari metode finansial yang inovatif ini, ArtistShare kemudian berfokus menjadi *crowdfunding* platform di tahun 2000. Tidak beberapa lama, banyak *crowdfunding* platform satu persatu bangkit dari seluruh dunia dan sejak saat itu, industri *crowdfunding* mulai tumbuh konsisten tiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri, era digital membuka peluang UKM untuk berkembang, termasuk dari segi skema permodalan. *Crowdfunding* dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang

ingin memperluas pangsa usahanya. Biasanya, bisnis startup apalagi dalam skala kecil akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank, karena rendahnya kredibilitas peminjam dan rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan aset yang bisa digunakan seandainya peminjam mengalami gagal bayar. Dengan adanya skema baru seperti *crowdfunding* akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, pendanaan melalui *crowdfunding* biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada jika meminjam di bank. Begitu pula bagi para penyandang dana, berinvestasi melalui *crowdfunding* memberikan *return* lebih tinggi dari deposito di bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi pula. Kata *crowdfunding* terdiri dari kata “*Crowd*” artinya keramaian dan “*funding*” artinya pembiayaan. Jadi *crowdfunding* bisa diartikan secara sederhana sebagai modal bisnis dengan patungan. Berdasarkan Wordspy istilah *crowdfunding* mulai digunakan secara masal ketika Michael Sullivan menggunakan istilah *crowdfunding* di situsnya, Fundavlog, pada tahun 2006.

Crowdfunding sendiri secara konsep bukanlah hal yang baru seperti yang terekam pada konser band rock Marilion.² Konsep *crowdfunding* sendiri telah diterapkan oleh penulis Jonathan Swift pada tahun 1700an. Ia memberikan pinjaman kepada keluarga miskin di pedesaan Irlandia agar mereka bisa membuat usaha kecil. Bahkan sebuah patung ikonik yang terletak di New York, Patung Liberti, merupakan hasil dari sebuah *crowdfunding* yang dicanangkan seorang

² Koren, Gijsbert, *A History Of Crowdfunding*, Smarter Money, 2010

Joseph Pulitzer yang berhasil menggalang dana massal melalui media koran The New York World. The World ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari seratus ribu dollar (\$101.091) yang terdiri dari 160.000 penyumbang yang terdiri dari anak kecil, pebisnis, tukang sapu jalan, hingga politikus. Dalam waktu singkat, Pulitzer mampu melewati batas waktu yang terbilang singkat dan berhasil menyelesaikan target 100.000 dollar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan patung tersebut. Jauh sebelum itu lagi, kembali ke tahun 1713 dimana seorang Alexander Pope, hendak menafsirkan puisi Yunani kuno ke dalam Bahasa Inggris dan meminta pada pelanggannya untuk memberikan sumbangsih berupa dua emas sebagai bantuan atas pengerjaannya dan imbalannya berupa edisi awal buku tersebut. Kemudian beberapa tahun kemudian, pada 1783, Mozart mengambil langkah yang sama. Dia berharap dapat tampil tiga kali di Viennese Concert Hall, dan dia menyebarkan undangan bagi siapapun yang hendak menyumbang dengan imbalan berupa *manuscript* pianonya. Hal ini terlihat seperti *crowdfunding* modern saat ini dimana investor maupun penyumbang mendapat kesempatan pertama untuk mencicipi produk buatan inisiator proyek. Konsep ini juga sudah diterapkan oleh Muhammad Yunus diatas melalui proyek mikrofinansial bersama Grameen Bank sejak tahun 1976. Melalui pembiayaan mikrokredit oleh Grameen Bank, penduduk miskin yang tidak memiliki modal atau memiliki ide usaha yang terlalu kecil untuk bisa dibiayai bank pada umumnya bisa mendapatkan modal dengan bunga di bawah rata-rata bank konvensional untuk memulai usaha. Jadi, bisa dikatakan konsep *crowdfunding* ini pada dasarnya memberikan pinjaman modal bagi mereka yang

ingin memulai usaha tapi tak cukup memenuhi kriteria untuk mendapatkan pinjaman dari bank pada umumnya.

Konsep permodalan ini berkembang menjadi apa yang kita sebut *crowdfunding* sekarang ditandai oleh dua elemen penting yaitu “web” dan “crowd”. Internet mulai berkembang di pertengahan tahun 1990an ketika orang-orang mulai menggunakan email sebagai aktivitas dunia maya sederhana. Munculah platform *microfinancial* pertama, Artistshare, pada tahun 2000, yang kemudian hal ini lebih dipopulerkan oleh kemunculan Kiva, pada tahun 2005. Platform ini memungkinkan para pengusaha meminjamkan uang bagi para pengusaha kecil di area berkembang di seluruh dunia. Kiva merupakan platform *microlending* tersukses di masa kini.³

Kemunculan Kiva diikuti dengan kemunculan situs *crowdfunding* lain seperti Kickstarter, Indiegogo, CrowdCube, Seedrs, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri gaung *crowdfunding* juga mulai marak. Kini banyak situs-situs yang memfasilitasi *crowdfunding* seperti patungan.net, wujudkan.com, dan gagas.web.id. Situs-situs *crowdfunding* ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide bisnis mereka dan jika menarik orang-orang bisa memberikan modal secara patungan kepada orang tersebut agar bisa memulai bisnisnya. Sebagai imbalannya, para pemberi modal bisa mendapatkan produk awal atau layanan atau imbalan lain yang menarik dari si pemilik bisnis.

Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi *crowdfunding* untuk mencapai level popularitas seperti sekarang hingga dapat meraih 2,7 juta dollar dalam tahun

³ Hemer, Joachim. *A Snapshot On Crowdfunding*, Karlsruhe, Franhoufer, 2011

2012 sendiri, sejak saat itulah popularitas *crowdfunding* semakin melesat dan terjadi banyak transaksi yang terjadi dengan jumlah uang yang sangat fenomenal karena banyaknya perorangan yang turut andil dan menyumbang suatu proyek agar berjalan

Aktivitas di dunia maya yang kian berkembang, ditandai dengan maraknya media sosial, memperluas fungsi konsep *crowdfunding*. Tak hanya berfungsi untuk memberikan pendanaan bagi usaha-usaha kecil, *crowdfunding* juga terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek idealis para seniman, sosial, atau bahkan politik. Misalnya saja band asal Inggris Marillion yang mengumpulkan dana dari para penggemarnya untuk tur musiknya di Amerika Serikat tahun 1997 melalui kampanye di internet bertajuk “*Tour Fund*”. Gerakan “Koin untuk Prita” pada tahun 2009 bisa menjadi salah satu contoh bentuk *crowdfunding* di Indonesia dalam kegiatan amal. Ada pula “Koin untuk KPK”, gerakan pengumpulan dana oleh masyarakat untuk membangun gedung baru KPK. Produser dan sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza pun menggunakan metode pendanaan ini untuk membiayai film *Atambua 390* yang dananya digalang pada tahun 2012.⁴

Perkembangan cepat *crowdfunding* ini mendapat berbagai tanggapan dari banyak pihak. Di satu sisi, ada pihak yang mengapresiasi keberadaan *crowdfunding* sebagai alat finansial yang mampu mendorong kemajuan ekonomi secara langsung dan terus menerus, namun ada juga pihak yang bersikeras mengatakan buruknya *crowdfunding* disebabkan minimnya pengaturan, regulasi, serta prosedur

⁴ Catur C Rahayu, *Penggalangan Dana Model Crowdfunding di Indonesia*, UI Press, 2014

penerapan yang terjadi di belakang. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada dasarnya *crowdfunding* modern tampil dalam bentuk digital sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam mengatur *crowdfunding* ini adalah dengan membuat regulasi penuh sesuai hukum positif atau justru tidak mengaturnya sama sekali.

Selain kerumitan mengenai prosedur, definisi, dan aturan. *Crowdfunding* sendiri muncul dalam beragam bidang dan beragam bentuk timbal-balik yang bisa dibidang sangat kontras satu sama lain. Bidang yang sangat luas (sosial, budaya, politik, dan ekonomi) serta bentuknya dapat dibagi menjadi tiga jenis besar, yakni:

1. *Equity-based Crowdfunding* atau model investasi biasa berupa penanaman modal dengan pengembalian berupa saham
2. *Credit-based* atau *debt-based lending crowdfunding* yaitu berupa peminjaman modal sebagai hutang untuk menjalankan proyek tertentu yang bilamana terdapat beragam bentuk timbal balik namun proyek yang dikatakan bahkan belum dilaksanakan
3. *Reward-based crowdfunding* dengan imbalan berupa hasil dari proyek pertama seperti yang kita ketahui telah populer sejak jaman dulu.
4. *Donation-based Crowdfunding* merupakan kebalikan dari *Reward-based* dimana Donatur tidak menerima imbalan apapun (disini disebut donatur). Biasanya berupa kegiatan sosial atau pendanaan gerakan sosial itu sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Dalam hal ini maka, *crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *Financial Technology*, namun belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal ini.

Di Indonesia sendiri, kesulitan *crowdfunding* sangat dirasakan akibat tidak adanya aturan tetap yang mengatur tentang keberjalanan *crowdfunding*, efek ini dapat dirasakan seperti kesulitan penyedia *crowdfunding* atau platformer dalam bermitra dengan bank karena tidak adanya izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk *crowdfunding*. Sehingga keberjalanan *crowdfunding* platformer di Indonesia ini berjalan dengan mencari celah hukum yang bergantung pada beragam acuan yang itu tergantung dari fokus proyek dan jenis *crowdfunding*nya, dapat dilihat dari contoh *Equity-based crowdfunding* yang berlindung dibalik Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan karena dianggap sebagai aktivitas pasar modal biasa seperti penanaman modal dan jual beli saham, dalam pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank, insitusi keuangan bukan bank yang mencakup dana pensiun, perusahaan pembiayaan, asuransi, jasa keuangan lainnya dan pasar modal.

Di sisi lain, *crowdfunding* berbasis sosial dan bantuan kemanusiaan berlindung dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Pengumpulan Barang bahwa :

“Undang-Undang ini mengatur setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.”

Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan uang atau barang tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesejahteraan Sosial apabila pengumpulan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, Gubernur untuk daerah tingkat I (atau provinsi) dan Bupati atau Walikota untuk daerah tingkat II. Undang-undang ini yang kemudian disempurnakan di peraturan-peraturan terbaru seperti PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang serta PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin. Terakhir yakni bagi *crowdfunding* yang bergerak di bidang ekonomi terlebih mikro kredit (*debt-based crowdfunding*) berlandung dibawah SK Kementerian Koperasi dan UKM yang mana wilayahnya sangat terbatas dan sangat sulit dalam bermitra dengan bank. Disinilah terlihat bagaimana ketidakteraturan keberjalanan *crowdfunding* di Indonesia akibat tidak adanya hukum yang khusus mengatur tentang hal tersebut. Terutama dalam bentuk program *Donation-based Crowdfunding* yang seringkali ditemui di Indonesia.

Untuk itu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Tentang *Donation-Based Crowdfunding* di Indonesia Dalam Rangka Kepastian Hukum” penulis ingin menganalisis kepastian hukum bagi pelaksanaan atau penerapan *Donation-based Crowdfunding* di Indonesia dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta mencari regulasi *crowdfunding* yang tepat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan atau penerapan *donation-based crowdfunding* di Indonesia?
2. Apa urgensi regulasi *donation-based crowdfunding* di Indonesia?
3. Bagaimana regulasi *donation-based crowdfunding* yang tepat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar yuridis keberadaan atau eksistensi *crowdfunding* di Indonesia guna memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan atau penerapan *crowdfunding* di Indonesia dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada
2. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi regulasi *donation-based crowdfunding* di Indonesia
3. Mencari regulasi *crowdfunding* yang tepat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pemikiran lebih lanjut dalam menentukan aspek legal serta regulasi yang tepat dalam pengaturan *crowdfunding* di Indonesia
- b. Memberikan pemahaman mengenai keberjalanan *crowdfunding* di Indonesia
- c. Sumbangsih dalam melengkapi khasanah kajian *crowdfunding* di Indonesia terutama dari sudut pandang hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah
Memberi masukan dalam menentukan langkah hukum dan sumbangan pemikiran terhadap produk hukum yang akan mengatur *crowdfunding* di Indonesia
- b. Aparat Penegak Hukum
Memberi masukan dalam upaya penyelesaian kasus *crowdfunding* di Indonesia
- c. Platformer/*crowdfunding* platform/penyedia jasa *crowdfunding*
Memberikan bahan masukan dan langkah mengenai apa yang perlu diketahui dalam menjalankan kegiatan *crowdfunding* di Indonesia agar tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia
- d. Inisiator Proyek
Memberikan wawasan mengenai aspek legal kegiatan *crowdfunding* di Indonesia

- e. Donatur perorangan maupun perdata

Memberikan wawasan lebih lanjut mengenai crowdfunding beserta aspek legalnya, sehingga lebih melindungi donatur dan mengurangi kemungkinan terburuk dalam berinvestasi dan penggalangan dana

- f. Masyarakat

Memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi masyarakat dalam penyaluran bantuan atau sumbangan. Selain itu dengan adanya peraturan khusus mengenai *crowdfunding* dapat mengurangi kasus penipuan berbasis pengumpulan dana online.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian yang nantinya dipaparkan oleh peneliti, terdiri dari 5 (lima) bab serta beberapa sub bab yang terdapat didalamnya. Berikut sistematika penulisan penelitian secara lebih rinci :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terlebih dahulu dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Disamping itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai orisinalitas kepenulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika kepenulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, membahas mengenai kajian pustaka. Jadi, dalam bab II ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup permasalahan (legal issue) yang diangkat oleh

peneliti secara umumnya saja jadi belum membahas permasalahanya (legal issue) secara lebih rinci.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti memaparkan mengenai jenis penelitian yang dibahas, pendekatan penelitian, jenis bahan hukumnya, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, peneliti membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dari sisi hukum melalui analisis secara normatif, yang nantinya mengeluarkan gagasan hukum dari penelitian yang peneliti bahas.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, berisi kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang penulis buat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Radbuch sebagaimana dikutip oleh Riswandi⁵ mengemukakan adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.⁶

Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Sudikno Mertokusumo⁷ menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh

⁵ Budi Agus Riswandi, **Aspek Hukum Internet Banking**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

⁶ Suseno, Franz Magnis, **Etika Politik**, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hal 145

Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.⁸ Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.⁹

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria, menulis buku berjudul *De delitti e delle pene*, yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai azas *nullum crimen sine lege*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara.¹⁰

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian

⁸ Manullang, E.Fernando M., **Menggapai Hukum Berkeadilan**, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.

⁹ E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

¹⁰ Manullang, E.Fernando M., *Op.Cit.* hal 93

hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.¹¹

Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno, perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya.¹² Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *Rechtstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip *Rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi.¹³ Apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan

¹¹ *Ibid.*, hal 94

¹² Frans Magnis Suseno, **Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

¹³ Manullang, E.Fernando M., *Op.Cit.* hal 94

tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Mikro

Menurut Microcredit Summit¹⁵ dalam Ashari¹⁶ definisi kredit mikro yakni:

“Programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families (Program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya)”

Sementara menurut Paket Kebijakan¹⁷ dalam buku Totok Budisantoso bahwa:

“Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp250 juta untuk membiayai usaha produktif”. Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp25 juta”.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*, hal 95

¹⁵ Microcredit Summit, **The Microcredit Summit Report**, REF, Washington DC, 1997

¹⁶ Ashari, **Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya**, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4: Jakarta, 2006

¹⁷ Panca Usaha, **Paket Kebijakan**, BP. Panca Usaha, Jakarta, 1993

¹⁸ Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**. Jakarta : Salemba Empat

Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua pernyataan di atas mempunyai persamaan bahwa kredit mikro diberikan bagi pengusaha kecil dan mikro dengan plafon kredit yang berbeda untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Usaha dikatakan produktif apabila usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan mereka.

Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan yang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mandala Manurung dan Prathama Rahardja menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”.¹⁹

Sementara itu menurut ahli lain, “LKM didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan”²⁰. Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), dalam Ashari²¹ bahwa “LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut”.

Walaupun terdapat banyak definisi LKM, terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

¹⁹ Mandala Manurung, Prathama Rahardja. 2004. **Teori Ekonomi Mikro Edisi Kedua**. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI

²⁰ Hadinoto, Soetanto, **Kunci Sukses Kredit Mikro**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005

²¹ Ashari, **Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya**, *Op.Cit.* hlm 148.

- a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

- b. Melayani rakyat miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.

- c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

C. Tinjauan Umum Tentang *Fundraising* (Galang Dana)

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan LSM, yayasan, dan contoh ekstrimnya *crowdfunding*. Untuk setiap pengumpulan dana yang bernuansa sosial, sebenarnya

sudah ada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU Pengumpulan Barang).²²

Pasal 1 Undang-Undang Pengumpulan Barang menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Sesuai dengan sistem dan tujuan *Donation-based Crowdfunding* maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat menjadi dasar pengaturan *Donation-based Crowdfunding* di Indonesia.

Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan uang atau barang tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesejahteraan Sosial kalau pengumpulan itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, Gubernur untuk daerah tingkat I (atau provinsi) dan Bupati atau Walikota untuk daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Penggalangan Dana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961.²³

April Purwanto mendefinisikan *fundraising* sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Peran dan fungsi tugas divisi penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari

²² Catur, *Penggalangan Dana Model "crowdfunding" di Indonesia*. Op. Cit.,

²³ *Ibid.*

berbagai perusahaan dan lembaga. Pada akhirnya bidang penghimpunan dapat meluaskan pencarian hingga ke luar negeri juga, baik ke masyarakat luar negeri, lembaga-lembaga sumbangan maupun ke berbagai perusahaan di luar negeri.

Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam program kegiatan ini akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain. Pada praktiknya, kegiatan fundraising juga tidak hanya dalam bentuk dana. Namun juga dapat berupa tenaga maupun benda (bertolak belakang dengan arti kata *fund*). Inti dari fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology* (FinTech)

Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang *Financial Technology*. Secara umum dan dalam arti luas, *Financial Technology* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan.²⁵ Secara spesifik, *Financial Technology* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan.²⁶ Dalam pengertian yang lebih luas, *Financial Technology* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S.(2017). *Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-10 (July). Canada : Bank of Canada.

²⁶ *Ibid.*,

perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *Financial Technology* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.²⁷

Aktivitas-aktivitas *Financial Technology* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:²⁸ Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran.²⁹ Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan *settlements* besar antar lembaga keuangan.

²⁷ Financial Stability Board (FSB, 2017a). *FinTech credit : Market structure, business models and financial stability implications*.

²⁸ Financial Stability Board (FSB, 2017b). *Financial stability implications from fintech*.

²⁹ Griffole, T. M. (2017). *Banking on change. Finance & Development (September)*, Vol. 54, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds.

Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi FinTech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *Financial Technology* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi FinTech dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.

Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *Financial Technology* yang menawarkan saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.

E. Tinjauan Umum Tentang *Crowdfunding*

Praktek pembiayaan proyek atau usaha baru (*venture*) dengan cara menggalang kontribusi pendanaan dari sejumlah besar orang (publik), yang dilakukan dengan menggunakan internet. Merupakan skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.

Crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. *Crowdfunding* menciptakan sebuah tren ‘investasi *online*’ dimana dalam website *crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di website toko *online*, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyeteroran dana sebagaimana dalam jual beli di toko *online*.³⁰

Crowdfunding telah menjadi sangat populer dan fenomenal di dunia internasional dengan jumlah platform *crowdfunding* mencapai 1.250 unit dan berhasil mengumpulkan dana mencapai USD16,2 Miliar di tahun 2014 dan meningkat dua kali lipat di tahun 2015 mencapai USD34,4 Miliar. Pada tahun 2016 diperkirakan jumlah platform *crowdfunding* semakin bertambah mencapai 2.000 unit dan diprediksi mampu mengumpulkan dana melebihi modal ventura dengan capaian pendanaan sekitar USD 60 Miliar.³¹

³⁰ Koren, Gijsbert, *A history of crowdfunding*, Smarter Money. 2010

³¹ *Ibid.*

Terdapat tiga jenis *Crowdfunding* :³²

a. *Equity-based Crowdfunding*

Sebuah *crowdfunding* berupa model investasi biasa yaitu penanaman modal oleh pemilik proyek dengan pengembalian berupa saham kepada investor

b. *Credit-based/Debt-based lending Crowdfunding*

berupa peminjaman modal sebagai hutang untuk menjalankan proyek tertentu dalam berbagai bentuk pinjaman. Proyek yang dimaksud tersebut belum dilaksanakan namun sudah dalam tahap proposal dan inisiasi, beberapa nama lain dari credit-based/debt based *crowdfunding* adalah:

i. *Online Lending*

ii. *Crowdlending*

iii. *Peer to Peer Lending*

c. *Reward-based Crowdfunding*

Crowdfunding dengan imbalan sekali jadi, biasanya berupa karya seni, penelitian, dan bentuk kreativitas lain. Imbalan berupa hasil dari proyek pertama itu sendiri, keuntungan tidak berjangka, perjalanan wisata, paten, atau penghargaan dalam berbagai bentuk.

d. *Donation-based Crowdfunding*

Merupakan kebalikan dari *Reward-based* dimana donatur tidak menerima imbalan apapun (disini disebut donatur). Biasanya berupa kegiatan sosial atau pendanaan gerakan sosial itu sendiri.

³² Freedman, David M. and Nutting, Matthew R., *A Brief History of Crowdfunding*, Friedman and Nutting, 2015

Crowdfunding memiliki beragam bentuk serta model tergantung dari platformer dan target pasar itu sendiri, namun secara umum, sebuah platform disebut *crowdfunding* apabila memiliki ciri-ciri.³³

- a. *Online* (tidak terpaku wilayah)
- b. *Peer to Peer Lending (P2PL)* dimana investor dan inisiator proyek langsung berhubungan tanpa ada campur tangan pihak ketiga kecuali platformer sebagai penyedia tempat
- c. Apabila pengumpulan dana, tidak selalu memenuhi kriteria multifinance (Peraturan OJK No. 24/2014) selain *equity-based crowdfunding* yang termasuk dalam pasar modal biasa
- d. Pihak ketiga (platformer) tidak turut menghimpun dana

F. Tinjauan Umum Tentang *Crowdsourcing*

Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok besar orang dalam ranah *online*. Konsep dasar dibalik istilah ini adalah menggunakan sekelompok besar orang untuk keahlian, ide, dan partisipasi mereka untuk menghasilkan konten atau membantu memfasilitasi pembuatan konten atau produk. Dalam arti, *Crowdsourcing* adalah distribusi dari penyelesaian masalah. Jika perusahaan membutuhkan pendanaan untuk proyek, konten pemasaran untuk campaign yang akan datang atau riset untuk produk baru, *crowdsourcing*-lah solusinya. Manusia yang banyak (*crowd*) ini

³³ *Ibid.*

adalah sumber daya yang handal yang mampu menghasilkan uang, konten dan informasi.³⁴

Crowdsourcing merupakan bentuk umum dari *Crowdfunding* dimana sumber daya yang diperlukan tidak sebatas dana, namun juga baik tenaga, informasi, hingga kegiatan bersama.

G. Tinjauan Umum Tentang Platformer atau *Crowdfunding Platform*

Pengelola sebuah situs website yang berisi program *Crowdfunding*. Platformer ini menawarkan situsnya sebagai sarana mempertemukan kedua pihak, yaitu Inisiator Proyek atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang mengiklankan proposal proyeknya di situs tersebut dengan Investor sebagai pihak yang memiliki modal untuk memilih proyek yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya. Bidang proyek serta metode pengumpulan dana biasanya merupakan visi dan identitas dari *crowdfunding* itu sendiri. Ada *crowdfunding* yang memiliki bidang khusus seperti sosial, karya seni, modal sehingga hanya inisiator proyek yang cocok dengan bidang yang ditentukan platformer lah yang bisa melakukan kegiatan di *website crowdfunding* tersebut, ada pula *crowdfunding* yang memiliki bidang umum secara universal tak terbatas bidang yang dimiliki.³⁵

Metode pengumpulan terkadang berbeda dari beberapa platformer, baik dari metode paket pilihan maupun pembayaran langsung, tetapi intinya semua *crowdfunding* tidak menghimpun dana terkecuali penahanan dana apabila terdapat

³⁴ Hemer, Joachim. **A Snapshot On Crowdfunding**, Karlsruhe, Franhoufer, 2011

³⁵ Clark, Bill, **The history & evolution of crowdfunding**, Mashable, 2011

ketentuan tertentu. Platformer memiliki sebuah aturan secara operasional dan administrasi tersendiri di *websitenya* guna mengatur keberjalanan transaksi baik dari segi kesuksesan penyaluran dana maupun keamanan dana dari transfer hingga keberjalanan, oleh sebab itu, baik pihak inisiator maupun *investor* awalnya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dalam sistem yang ada di *website*. *Crowdfunding* yang baik biasanya memiliki metode pendaftaran serta penyaluran dana yang terkesan rumit namun jelas dan tidak jarang disertai dengan *survey* secara lapangan oleh pihak platformer kepada inisiator proyek atau dengan inisiatif inisiator agar proyeknya lebih dipercaya.³⁶

H. Tinjauan Umum Tentang Donatur *Crowdfunding* (Donatur)

Seseorang, sekelompok orang, atau sebuah badan yang memiliki dana untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan mealui suatu website *crowdfunding* guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.³⁷

I. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kementerian Sosial dalam Pegumpulan Sumbangan

Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos) dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan

- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

J. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Pengawasan Sistem *Crowdfunding*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - i. izin usaha;
 - ii. izin orang perseorangan;
 - iii. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - iv. surat tanda terdaftar;
 - v. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - vi. pengesahan;
 - vii. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - viii. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Apabila dilihat dari konsep dan mekanisme *crowdfunding* sendiri yang bisa diartikan secara sederhana merupakan modal bisnis dengan patungan. Maka dengan kata lain platformer *crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai

Lembaga Jasa Keuangan lain dibawah wewenang OJK, dimana OJK memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan dari *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh berbagai platform di Indonesia serta berbagai kewenangan lain yang telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagai berikut :

Pasal 9

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial*

technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. *Crowdfunding* merupakan salah satu inovasi dari *financial technology* yang melibatkan transaksi pembayaran dalam pengumpulan dana bagi penyelenggara.

Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan keputusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghadirkan urgensi dari pengaturan tentang *Donation-based Crowdfunding*, dimana terdapat kekaburan dan kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan pengumpulan sumbangan melalui program *Donation-Based Crowdfunding*. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari sudut bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengumpulan sumbangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan tidak hanya pada bahan perundang-undangan di Indonesia saja tetapi juga bahan-bahan hukum dan jurnal-jurnal ilmiah dari luar negeri yang berkaitan dengan *Crowdfunding* khususnya mengenai *Donation-based Crowdfunding*. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan perundang-undangan).

B. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian hukum normatif ini sendiri menekankan kepada suatu bentuk regulasi dan pejabat berwenang yang pantas dalam pengaturan *Donation-based crowdfunding* di Indonesia sehingga diperlukan setidaknya tiga pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dengan melihat sejauh mana perundang-undangan di Indonesia saat ini mengatur *crowdfunding* yang telah berjalan dengan kekaburan hukum yang ada

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Di samping pendekatan perundang-undangan yang melihat sisi hukum di Indonesia sebagai subjek pengatur *crowdfunding* dalam keberjalanannya saat ini, dibutuhkan pula sudut pandang terhadap kasus yang terjadi, hal ini ditinjau dari sisi para pemeran *crowdfunding* baik itu *crowdfunding* platformer, inisiator proyek, maupun dari donatur perorangan maupun badan dalam menyikapi dan keberjalanan proyek dalam *crowdfunding* di Indonesia

3. Perbandingan (*comparative approach*)

Dengan melihat berbagai kasus dan keberjalanan *crowdfunding* di Indonesia yang memiliki beragam bentuk mulai dari sosial, kredit usaha, hingga investasi, perbandingan regulasi dengan negara lain sangat diperlukan guna mencari sejatinya bentuk hukum yang tepat dalam mengatur keberjalanan *crowdfunding* di Indonesia. Adapun negara yang dijadikan sebagai perbandingan tersebut adalah negara yang memiliki regulasi tertulis terkait

crowdfunding seperti Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Alat penelitian penulis tidak terlepas dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Untuk menyelesaikan isu mengenai permasalahan hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹ Sifat dari bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis menggunakan bahan hukum primer :

- i. UUD 1945 Negara Republik Indonesia
- ii. Perundang-undangan berupa UU:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 41.

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
- iii. Perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.
 3. Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Syarat dan Ketentuan Lembaga, dan Pencatatan Data Personal Lembaga
- iv. Keputusan setingkat menteri:
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam.
 2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat.
 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberin Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- e. Bahan Hukum Sekunder
 - i. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
 - iii. Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - iv. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - v. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - vi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - vii. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
 - viii. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang

- ix. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin
- x. Penjelasan Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Syarat dan Ketentuan Lembaga, dan Pencatatan Data Personal Lembaga
- xi. Penjelasan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam.
- xii. Penjelasan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat.
- xiii. Penjelasan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberin Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan
- xiv. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- xv. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- xvi. Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- xvii. Bank Umum.
- xviii. Hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan keberjalanan *crowdfunding* di Indonesia
- xix. Hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul proposal

- xx. Berita, blog, serta catatan resmi dari *Crowdfunding* Platform
- f. Bahan Hukum Tersier
 - i. Kamus hukum
 - ii. Buku-buku yang mengkaji hal mengenai hukum perdata bisnis
 - iii. Buku-buku yang mengkaji hal mengenai *crowdfunding* secara umum
 - iv. Berita faktual yang dapat dipertanggungjawabkan
 - v. Artikel mengenai perkembangan dan keberjalanan *crowdfunding* baik di Indonesia maupun di negara asing

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- 2) Perpustakaan Umum Kota Malang;
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia;
- 4) Situs Internet.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan maka bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berupa bahan-bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang ada

terkait pengumpulan sumbangan berbasis *Crowdfunding* ditambah dengan penelusuran bahan hukum melalui internet.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam mengkaji dan menyusun penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah dengan teknik interpretasi atau penafsiran. Teknik Interpretasi atau penafsiran yang digunakan penulis adalah interpretasi teleogikal dan sistematis. Interpretasi teleogikal adalah interpretasi yang membantu penulis dalam mengerti ratio legis dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memenuhi tiga fungsi utama hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Sementara itu interpretasi sistematis digunakan penulis untuk melihat korelasi antara satu instrumen hukum dengan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dalam mengatur suatu hal yang sama. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menyusun bentuk kepastian hukum pengumpulan sumbangan berbasis sistem *Crowdfunding* dengan menganalisis materi terkait dalam regulasi yang telah ada.

G. Definisi Konseptual

1. *Crowdfunding*

Praktek penggalangan dana online dengan empat bentuk (*Equity*, *Reward*, *Debt*, dan *Donation*) dan terdiri dari tiga jenis subjek (Inisiator Proyek, Platformer, Donatur) yang secara langsung melakukan aktivitas tersebut

2. Inisiator Proyek

Seseorang atau badan usaha yang memiliki ide atau proyek yang butuh dibiayai dan menyajikan proposal interaktif di dalam situs *crowdfunding* yang dikelola oleh platformer

3. Donatur

Individu atau sekelompok individu yang memberikan sumbangan melalui situs *crowdfunding* yang dikelola oleh platformer

4. Platformer

Pengelola serta pemilik situs *website crowdfunding*. Berperan mempertemukan permintaan dan penawaran dalam aktivitas *crowdfunding* di situsnya. Mewadahi penyelenggara dengan sebuah situs yang mampu menunjang dukungan secara media agar proyek tersebut dapat tersaji secara interaktif dan kemudahan akses kepada donatur potensial.

5. Asas Kepastian Hukum

Hukum asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Mengenai *Donation-based Crowdfunding* dalam Penghimpunan Dana Sosial yang Berkepastian Hukum

1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengumpulan Dana Secara Online

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain, atau independen, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU OJK.³⁹

Keberadaan OJK di Indonesia bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel, serta mampu membangun sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁰

OJK sendiri memiliki fungsi sebagai Lembaga yang menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴¹ Oleh

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

karena itu, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Lembaga Jasa Keuangan, dalam hal ini bisa dilihat dari sektor usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh umum dari Lembaga Jasa Keuangan lain yakni Perusahaan Penjaminan Kredit, Perusahaan Penjaminan Infrastruktur, Lembaga Penyediaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Perusahaan Pegadaian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Lembaga Keuangan Mikro.

Apabila dilihat dari konsep dan mekanisme *crowdfunding* sendiri yang bisa diartikan secara sederhana merupakan modal bisnis dengan patungan. Maka dengan kata lain platformer *crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lain dibawah wewenang OJK, dimana OJK memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan dari *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh berbagai platform di Indonesia serta berbagai kewenangan lain yang telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagai berikut :

Pasal 9

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴² Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴³

Pengumpulan dana secara online melalui *crowdfunding* secara otomatis melibatkan Transaksi Elektronik antara platformer *crowdfunding* dengan pihak penyelenggara maupun donatur, sehingga perlu memperhatikan peraturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.”⁴⁴

Dengan terbentuknya Lembaga Serifikasi Keandalan ini para platformer *crowdfunding* dapat menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik yang dilaksanakan. Dalam pasal 10 ayat (2) telah memuat mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012.

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴³ Pasal 2 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain itu di dalam transaksi elektronik juga melibatkan informasi pribadi maupun korporasi dari berbagai pihak. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”⁴⁵

Sehingga keterbukaan platformer mengenai informasi yang berkaitan dengan *crowdfunding* serta mekanisme dan data korporasi menjadi bagian yang wajib dipenuhi oleh platformer dalam segala kegiatan dan produk yang ditawarkan kepada penyelenggara maupun donatur.

Begitupun dengan informasi yang diberikan oleh penyelenggara dan donatur, segala bentuk perlindungan dan pengaturan akan informasi tersebut telah tercantum dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan

⁴⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pemrosesan transaksi pembayaran. *Crowdfunding* merupakan salah satu inovasi dari *financial technology* yang melibatkan transaksi pembayaran dalam pengumpulan dana bagi penyelenggara.

Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.

Sehingga mengenai proses pembayaran dalam *crowdfunding* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:

- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
- b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
- c. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
- d. menerapkan perlindungan konsumen; dan

e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Salah satu tujuan dari terbentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 ini ada untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia perlu mendorong peran pelaku domestic antara lain melalui penataan struktur. Selain itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran ini juga dapat menjadi dasar pembentukan peraturan mengenai *crowdfunding*. Namun, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 hanya mengatur proses pembayaran hingga dana sampai pada platformer. Proses penyaluran dana itu sendiri selanjutnya diatur dalam peraturan lain dan menjadi wewenang Lembaga lain untuk mengatur mengenai penyaluran dana tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 hanya terbatas pada keamanan transaksi tersebut.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu bentuk dari mekanisme *crowdfunding* yakni *Credit-based* atau *debt-based lending crowdfunding* yaitu berupa peminjaman modal sebagai hutang untuk

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

menjalankan proyek tertentu yang bilamana terdapat beragam bentuk timbal balik namun proyek yang dikatakan bahkan belum terlaksana.

Transaksi berupa peminjaman modal dalam *crowdfunding* ini sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 definisi dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁴⁷

Sehingga menjadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 cukup relevan untuk menjadi dasar pembentukan peraturan mengenai *crowdfunding* khususnya dalam bentuk *Credit-based* atau *Debt-Based Lending Crowdfunding*.

Selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran, perizinan, dan kelembagaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum memiliki pengaturan yang resmi dari OJK, namun terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dapat dijadikan acuan sementara dalam mekanisme pendaftaran, perizinan, dan kelembagaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengumpulan Dana Untuk Keperluan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang definisi dari pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental / agama / kerokhanian, kejasmanian, dan kebudayaan. Pengumpulan uang atau barang ini pada hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia.

Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventif, maupun represif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas. Contoh:

- a) zakat/zakat fitrah
- b) pengumpulan didalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya.
- c) Gotong-royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut.
- d) lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya.
- e) diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.⁴⁸

Wewenang perizinan terhadap pengumpulan uang atau barang dilakukan oleh Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur atau Bupati/Walikota. Mekanisme pelaksanaan pengumpulan uang dan barang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

⁴⁹ *Ibid.*,

Beberapa contoh bentuk pengumpulan uang dan barang yakni, pengumpulan uang dan barang untuk bencana alam yang lebih lanjut diatur dalam Kepmensos Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam kemudian pengumpulan sumbangan sosial oleh masyarakat yang diatur dalam Kepmensos Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat serta pelayanan sosial untuk fakir miskin yang secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.

Crowdfunding merupakan salah satu bentuk pengumpulan uang atau barang melalui sistem *Donation-based Crowdfunding* dimana donatur tidak menerima imbalan apapun (disini disebut donatur). Biasanya berupa kegiatan sosial atau pendanaan gerakan sosial itu sendiri. Namun, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang *Donation-based Crowdfunding* itu sendiri. Begitupun dengan wewenang pelaksanaannya, belum ada peraturan mengenai Lembaga/Badan Hukum yang berwenang dalam *crowdfunding* berbasis sosial ini.

Jika ditelaah lebih jauh, mengenai sistem dan tujuan dari *Donation-based Crowdfunding*, dimana merupakan pengumpulan uang atau barang dengan tujuan sebagai kegiatan sosial atau pendanaan gerakan sosial yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Maka

menurut pendapat penulis, Lembaga/Badan Hukum yang tepat untuk mengemban wewenang pelaksanaannya yakni Yayasan. Mengapa?

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai Lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.⁵⁰ Untuk lebih jelasnya, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dari sejumlah Yayasan yang ada di negara kita dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit. Pengaturan mengenai Yayasan sendiri, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵⁰ R. Murjiyanto, SH,MKn, **Badan Hukum Yayasan**, Liberty, Yogyakarta, 2011

Selain itu merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa Di Jakarta Selatan, dalam hal ini Menteri Sosial memberikan wewenang pelaksanaan *crowdfunding* berbasis sosial kepada Kita Bisa yang telah memiliki badan hukum berbentuk Yayasan.

3. Analisis Perbandingan Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai *Crowdfunding* dengan Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain

a) Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang *Crowdfunding* di Negara Lain

Guna memperluas wawasan mengenai pengaturan *crowdfunding*, penulis merasa perlu untuk menyajikan perbandingan serta analisis peraturan *crowdfunding* di negara lain, antara lain yakni:

a. Singapura

Di Singapura, *Crowdfunding* diatur oleh MAS (*Monetary Authority of Singapore*). Untuk melaksanakan kegiatan *crowdfunding* pihak platformer harus memiliki lisensi khusus dari MAS (*Monetary Authority of Singapore*). Namun pengaturan *crowdfunding* di Singapura hanya terbatas pada *Equity-based* dan *Debt-based Crowdfunding*. Untuk *Reward-based* dan *Donation-based Crowdfunding* belum memiliki pengaturan khusus. Selain itu di Singapura, Perusahaan/Institusi lebih mudah dalam mengajukan

proyek *crowdfunding* dibandingkan perorangan yang memiliki banyak restriksi seperti batas dana serta waktu penggalangan.

b. Malaysia

Sebagai negara pertama di ASEAN yang meregulasi *Equity-based Crowdfunding*, Malaysia meletakkan wewenang pengaturan *crowdfunding* pada SC (*Securities Comission*). Tidak jauh berbeda dengan Singapura, untuk menyelenggarakan kegiatan *crowdfunding* pihak platformer harus memiliki izin khusus dari SC (*Securities Comission*). Selain itu, Malaysia juga hanya meregulasi mengenai *Equity-based* dan *Debt-based Crowdfunding*. Untuk *Reward-based* dan *Donation-based Crowdfunding* belum memiliki pengaturan khusus. Untuk *Debt-based Crowdfunding*, baik pihak platformer maupun pihak penyelenggara harus terdaftar di SC (*Securities Comission*).

c. Amerika Serikat

Sejauh ini Amerika Serikat juga hanya meregulasi tentang *Equity-based* dan *Debt-based Crowdfunding* saja. Untuk *Reward-based* dan *Donation-based Crowdfunding* belum memiliki pengaturan khusus. Regulasi tentang *crowdfunding* Amerika Serikat, diatur dalam amandemen terbaru *Securities Act*, berupa *JOBS act (Jumpstart Our Business Startup)*

d. Inggris

Di Inggris, *crowdfunding* diatur oleh FCA (*Financial Conduct Authority*). Dimana pihak platformer yang ingin melakukan kegiatan *crowdfunding* harus terdaftar di FCA (*Financial Conduct Authority*). Sejak bulan April tahun 2014, Inggris telah secara resmi meregulasi pengaturan tentang *Equity-based* dan *Debt-based Crowdfunding*. Sedangkan untuk *Reward-based* dan *Donation-based Crowdfunding* tidak diatur oleh FCA namun tidak ada larangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. Jerman

Wewenang pengaturan *crowdfunding* di Jerman, diberikan kepada BaFin (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*), atau bisa disebut sebagai *Federal Financial Supervisory Authority*. Segala bentuk *crowdfunding* yang menawarkan jasa pengumpulan dana serta investasi, semua termasuk kedalam aturan jasa keuangan. Tergantung dari distribusi dan tujuan dananya, *Donation* dan *Reward-based* tidak termasuk dalam investasi.

f. Italia

Di Italia, *crowdfunding* hanya diatur dalam bentuk investasi. Pengaturan mengenai masing-masing jenisnya pun berada pada wewenang yang berbeda. Untuk *Equity-based Crowdfunding* diatur dalam *Regulated Activities Regime*. Sedangkan untuk *Debt-based Crowdfunding* diatur dalam *Consolidated Bank Law and Relevant Regulation*. Tergantung strukturnya, *Donation-based* dan *Reward-*

based Crowdfunding tidak termasuk dalam *investment products*, sehingga tidak terdapat pengaturan khusus mengenai hal ini.

g. Spanyol

Di Spanyol, *Equity-based crowdfunding* bukan termasuk dalam jasa finansial meski beberapa ciri-cirinya masuk kedalam cakupan MiFID (*Markets in Financial Instruments Directives*) dan *Spanish Financial Services Law*. Untuk *Debt-based Crowdfunding* diatur dalam *Regime For Corporations. Donation* dan *Reward-based* tidak termasuk dalam regulasi. Selain itu, Tidak ada *Crowdfunding* platform yang diawasi oleh Bank Spanyol maupun CNMV (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*).

b) Analisis Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan

Dikarenakan belum adanya Peraturan tetap yang mengatur mengenai *crowdfunding* maka, untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial, dengan maksud untuk terciptanya ketertiban dan melindungi masyarakat.

Pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh Yayasan Kita Bisa merupakan bentuk *Donation-based Crowdfunding* yang bergerak di bidang sosial masyarakat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dimana hasil

dari pengumpulan sumbangan tersebut akan digunakan untuk bantuan medis, atlet dan fasilitas olahraga, infrastruktur Pendidikan dan beasiswa, difabel, umrah dan Haji, Paniti Asuhan, Rumah Ibadah dll.⁵¹

Pemberian izin kepada Yayasan Kita Bisa ini berlaku dalam jangka 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai tanggal 31 Mei 2018. Selain itu, Yayasan Kita Bisa wajib memberikan laporan tertulis kepada Menteri Sosial mengenai penyelenggaraan pengumpulan sumbangan mulai tanggal berakhirnya pelaksanaan pengumpulan sumbangan.⁵²

Paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan hasil sumbangan program *Crowdfunding* www.kitabisa.com digunakan untuk bantuan medis, atlet dan fasilitas olahraga, infrastruktur Pendidikan dan beasiswa, difabel, umrah dan Haji, Paniti Asuhan, Rumah Ibadah dll. Selanjutnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah sumbangan yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.⁵³

Penyaluran hasil sumbangan terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari pejabat Kementerian Sosial, Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan untuk itu. Hasil pengumpulan sumbangan dan peyalurannya dibuatkan

⁵¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

Berita Acara oleh Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan ini melalui informasi jelas dan transparan dengan membuat laporan tertulis secara benar disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *crowdfunding* oleh Yayasan Kita Bisa, dijelaskan dalam pasal Ketigabelas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018, yang berbunyi :

“Dalam hal penerima izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan”⁵⁵

Mengenai bentuk sanksi yang akan dijatuhkan sejauh ini belum memiliki penjelasan lebih lanjut, untuk itu perlu dibentuk suatu peraturan khusus sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

B. Urgensi Pengaturan *Donation-based Crowdfunding* di Indonesia

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Hal ini berarti, bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali.⁵⁶

Ternyata , sebagaimana dikemukakan di atas, masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingan dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.⁵⁷

Lahirnya suatu peraturan hukum berasal dari nilai-nilai dasar dari hukum. Nilai-nilai dasar dari hukum yakni Keadilan, Kegunaan dan Kepastian. Dalam hal ini peraturan merupakan elemen penting dalam rangka menegakkan kepastian hukum. Peraturan hukum merupakan lambang yang mewakili norma hukum di masyarakat. Peraturan hukum juga dapat menjadi tolak ukur suatu peristiwa, apakah termasuk dalam peristiwa hukum atau bukan.⁵⁸

Peristiwa hukum juga memiliki peran yang penting dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Suatu peristiwa hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dapat mendorong urgensi dalam pembentukan sebuah peraturan.⁵⁹ Urgensi berasal dari bahasa latin yaitu *urgere* yang bermakna mendorong. Istilah urgensi merujuk kepada sesuatu yang mendorong dan merupakan

⁵⁶ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

⁵⁷ *Ibid.*, hal 19

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hal 38

kebutuhan yang mendesak dan penting untuk segera diselesaikan dan ditindaklanjuti.⁶⁰

Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan salah satu peristiwa yang belum memiliki kepastian hukum berupa peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Mengingat praktek pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang *crowdfunding* yang berbentuk *Donation-based Crowdfunding* tersebut.

Adapun dasar-dasar pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang ideal adalah :

- 1) Dasar Yuridis

Dasar yuridis adalah landasan pertimbangan yang mendeskripsikan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Ajeng Radyati, **Urgensi Pengaturan *Green Banking* Dalam Kredit Perbankan di Indonesia**, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 9. (*online*), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/678/665>

⁶¹ H. Aziz Syamsuddin, **Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 253.

2) Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis adalah dasar pertimbangan yang mendeskripsikan mengenai tujuan pembentukan peraturan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.⁶²

3) Dasar Ekonomis

Dasar ekonomis merupakan dasar pertimbangan yang mendeskripsikan implementasi demokrasi ekonomi berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketiga dasar ini merupakan landasan urgensi regulasi pengaturan mengenai *Donation-based Crowdfunding* dalam penghimpunan dana sosial yang berkepastian hukum.

Aspek Yuridis berkaitan dengan permasalahan hukum yang relevan dengan substansi atau materi yang diatur atau pelimpahan wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Pembentukan peraturan perundang-undangan berlandaskan atas dua asas penting yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan dan

⁶² Hamzah Halim dan Kemal Redindo, **Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 34.

asas materi muatan yang tepat.⁶³ Dasar yuridis berasas formal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Kementerian Sosial memiliki wewenang dalam mengawasi dan memberikan izin terkait pengumpulan uang atau barang dengan skala nasional atau yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dan merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial untuk mengawasi dan menetapkan kebijakan atas kegiatan tersebut. Selain itu dalam UU OJK mengamanatkan kepada OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Maka pengawasan terhadap dana yang terhimpun melalui pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan wewenang OJK.

Asas-asas material dasar yuridis yang harus dipenuhi antara lain adalah asas pembentukan harus sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara, asas harus sesuai dengan hukum dasar negara, asas harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Pengaturan mengenai pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan penerapan dari

⁶³ A. Hamid S. Attamimi, **Dari Perkuliahan Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.

Pancasila sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 juga menyebutkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Melalui pengumpulan sumbangan dari masyarakat dengan mengaplikasikan program *crowdfunding*, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling bergotong-royong demi menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Berbagai instrumen peraturan perundang-undangan lainnya baik secara implisit dan eksplisit mengatur mengenai pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding*, yang disusun sebagai upaya mengatasi permasalahan hukum dan sosial dengan memperhatikan dasar yuridis, sosiologis dan ekonomis. Permasalahan hukum yang dapat timbul dalam pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* adalah terjadinya kasus penipuan berkedok pengumpulan sumbangan serta pencucian dana kerap terjadi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan sosial. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, maka harus dibentuk suatu peraturan dengan mempertimbangkan nilai aturan yang ada guna menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Regulasi mengenai *Donation-based Crowdfunding* ini diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Bank

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.03/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin, Kepmensos Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam, Kepmensos Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan. Namun, permasalahan hukum yang terjadi adalah peraturan tersebut bersifat umum dan tersebar sehingga tidak sistematis pengaturannya. Materi pengaturan yang diatur didalamnya pun, masih tidak harmonis antara satu peraturan dengan peraturan lain serta seringkali ditemukan kekaburan makna pasal di dalamnya. Maka dari itu, perlu diatur regulasi yang sistematis dan harmonis mengenai pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding*.

Aspek Sosiologis, mendeskripsikan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap suatu instrumen peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan dan tuntutan perkembangan zaman. *Donation-based Crowdfunding* mengaplikasikan budaya gotong-royong yang menjadi intisari dari sila ke-5 Pancasila. Gotong-royong adalah suatu faham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, suatu perjuangan bantu-membantu.⁶⁴ Gotong-royong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua atau jerih payah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Dalam azas gotong-royong sudah tersimpul kesadaran bekerja rohaniyah maupun kerja jasmaniah dalam usaha atau karya bersama yang mengandung didalamnya keinsyafan, kesadaran dan sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan. Dengan berkembangnya tata-tata kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, gotong-royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata-kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat Bangsa

⁶⁴ Lihat bahasan Sartono Kartodijjo, 1987, "Gotong -royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), **Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia**, Jakarta, Yayasan Obor.

Indonesia.⁶⁵ Selain itu amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 juga menyebutkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Mencermati prinsip yang terkandung dalam gotong-royong serta pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 jelas melekat aspek-aspek yang terkandung dalam *Donation-based Crowdfunding*. Pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* secara konseptual bercirikan adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Dorongan kerelaan (keinsyafan dan kesadaran) yang dapat menumbuhkan energi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai-nilai dari *Donation-based Crowdfunding*.

Aspek Ekonomis, Pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena terjaminnya kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern, penyelenggara *crowdfunding* dapat menekan biaya operasional pengumpulan dana hingga paling banyak hanya 10% dari jumlah dana yang terkumpul. Sehingga dana yang terhimpun dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan lebih maksimal. Keuntungan bagi donatur yang ingin menyumbang juga akan lebih terbantu dengan pemanfaatan teknologi internet

⁶⁵ *Ibid.*,

dan transfer antar bank, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional lainnya. Selain itu melalui *Donation-based Crowdfunding*, diharapkan juga dapat memulihkan ekonomi setelah bencana melalui pendanaan usaha baru bagi masyarakat korban bencana alam.

Namun, sangat disayangkan jika pemanfaatan teknologi modern ini dipergunakan untuk melakukan tidak kecurangan seperti penipuan maupun pencucian uang, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan menjadikan masyarakat enggan untuk bergotong-royong memberikan sumbangan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Untuk itu dibutuhkan suatu peraturan yang harmonis dan sistematis agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

C. Regulasi Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Melalui Program *Donation-based Crowdfunding*

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁶⁶ Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa,

⁶⁶ C.S.T. Kansil, 1986, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 538

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.⁶⁷

Ajaran cita hukum merumuskan ada tiga unsur cita hukum yang proporsional dalam pembentukan regulasi peraturan perundang-undangan yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum. Asas merupakan hukum dasar atau dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut.⁶⁸ Apabila kita sekarang sampai pada pembicaraan mengenai asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan hukum yang lain. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan

⁶⁷ *Ibid.*, hal 539

⁶⁸ Tata Wijayanta, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas GadjahMada, Vol. 14 No.2 Mei 2014, (online). <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=287908>

jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁶⁹

Makna asas kepastian hukum adalah terjaminnya pengaturan yang berkekuatan hukum tentang sesuatu hal yang memberikan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Asas kepastian hukum dimaknai dengan adanya ketegasan serta kejelasan dari suatu bentuk norma hukum tertulis. Tanpa adanya asas kepastian hukum, norma hukum akan kehilangan makna dan multitafsir sehingga tidak berdayaguna bagi masyarakat.⁷⁰ Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang seseorang yang berarti bahwa setiap orang dalam melakukan perbuatannya memiliki akibat hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat akan terjamin.

Asas kepastian hukum merupakan perwujudan ciri negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum tanpa asas kepastian hukum akan multitafsir dan kehilangan makna maka ciri dari norma hukum tertulis adalah jaminan asas kepastian hukum. Norma hukum tertulis dapat berdayaguna karena dapat dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat. Pembentukan regulasi harus saling berkesinambungan tidak menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila ada regulasi yang mengatur mengenai suatu hal yang sama kontradiktif dengan regulasi yang lain maka akan menimbulkan

⁶⁹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, **Ilmu Hukum**, Op.Cit., hal 45

⁷⁰ Fernando Manulang, **Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 154.

ketidakpastian dalam penerapannya di masyarakat. Kepastian hukum akan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

1. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, dan
2. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁷¹

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan
- f. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-

⁷¹ Tata Wijayanta, *Op.Cit.*,

undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷²

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

⁷² *Ibid.*,

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁷³

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut:⁷⁴

a. Pengayoman;

Asas pengayoman adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan;

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan;

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka tunggal ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan;

Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

j. Keseimbangan , keserasian, dan keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.

Peraturan Perundang-undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Moh. Mahfud MD membedakan secara tajam karakter produk hukum antara produk hukum yang *responsive/populistik* dengan produk hukum *konservatif/ortodoks/elit*, bahwa:

“Produk hukum *responsive/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat *responsive* terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.”⁷⁵

⁷⁵ Moh. Mahfud M.D, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Materi muatan yang harus diatur dengan UUD meliputi:

1. hak asasi manusia,
2. hak dan kewajiban warga negara,
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
4. wilayah negara dan pembagian daerah,
5. kewarganegaraan dan kependudukan,
6. keuangan negara

Jika ditinjau melalui pengaturan *Crowdfunding* khususnya *Donation-based Crowdfunding* pada negara lain maka dapat ditarik beberapa contoh pengaturan yang bisa diterapkan dalam pembentukan regulasi mengenai pengumpulan sumbangan melalui program *crowdfunding* di Indonesia. Dalam hal ini negara Jerman dan Inggris memiliki sistem yang cukup baik dalam pengaturan *crowdfunding* meskipun belum juga mengatur secara khusus mengenai *Donation-based Crowdfunding*, namun terdapat lembaga khusus yang mengatur mengenai *Crowdfunding*. Sebagai contoh di Inggris *crowdfunding* diatur oleh FCA (*Financial Conduct Authority*). Dimana pihak platformer yang ingin melakukan kegiatan *crowdfunding* harus terdaftar di FCA (*Financial Conduct Authority*). Sedangkan di Jerman wewenang pengaturan *crowdfunding* diberikan kepada BaFin (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*), atau bisa disebut sebagai *Federal Financial Supervisory Authority*. Segala bentuk *crowdfunding* yang menawarkan jasa pengumpulan dana serta investasi, semua termasuk kedalam aturan jasa keuangan.

Pembentukan regulasi mengenai pengumpulan sumbangan melalui program *crowdfunding* di Indonesia harus memberikan perlindungan untuk menciptakan keamanan informasi dan transaksi pengguna. Materi muatan juga harus mencerminkan ketepatan dan kejelasan tujuan donasi atau untuk apa dana tersebut disalurkan. Selain mengatur, tapi juga menjunjung budaya Indonesia dalam hal sosial (gotong royong membantu sesama) serta memberi peraturan yang memberikan kepastian, keamanan, dan kejelasan untuk tujuan sosial. Regulasi ini nantinya harus dibentuk sesuai dengan sifat dan watak bangsa Indonesia, mengedepankan prinsip gotong royong yang melekat pada substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat Bangsa Indonesia, memperhatikan keragaman penduduk sehingga tidak ada keuntungan yang ditimbulkan bagi satu kaum bangsa saja, memperhatikan keadilan secara merata bagi berbagai pihak, memperhatikan tujuan pembentukan regulasi yaitu terciptanya keadilan hukum dan terjaminnya rasa kepastian hukum bagi penyelenggaraan sumbangan melalui program *crowdfunding* dan kebutuhan masyarakat akan jasa pengumpulan sumbangan secara kolektif serta mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam masyarakat Indonesia.

Bahan pembuatan hukum atau peraturan, dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum. Pada dasarnya kita bias membagi proses dalam

pembuatan hukum ini dalam dua golongan tahap besar,yaitu tahap sosio-politis dan tahap yuridis.⁷⁶

Dalam tahap sosio-politis, maka gagasan awal tadi diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.⁷⁷ Tahap berikutnya adalah tahap akhir berupa pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Yang dimaksud dengan dasar yuridis di sini, misalnya adalah perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang telah ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem, baik dalam konteks mengikuti tahap-tahap tersebut secara lengkap.⁷⁸

Hukum tidak lain adalah pemberian hak-hak kepada subjek dalam perhubungan hukumnya dengan subjek lainnya. Kebalikan dari hak suatu subjek ialah kewajiban dari subjek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut sebagai subjek hukum.⁷⁹ Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu elemen penting adalah penentuan subjek hukum yang akan melaksanakan kewajiban serta menerima hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam hal pembentukan regulasi mengenai *Donation-based Crowdfunding*,

⁷⁶ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, **Ilmu Hukum**, *Op.Cit.*, hal 187

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 188

⁷⁹ R. Ali Rido SH, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, PT Alumni Bandung,2004. Hal. 2

perlu ditentukan subjek hukum berupa badan hukum yang nantinya dapat menjadi platformer dalam pengumpulan sumbangan melalui program *crowdfunding*.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.⁸⁰

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

Black's Law Dictionary⁸¹ memberikan pengertian *legal persons* ialah :

“An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being (Suatu entitas seperti korporasi, diciptakan oleh hukum yang kemudian diberikan hak dan kewajiban

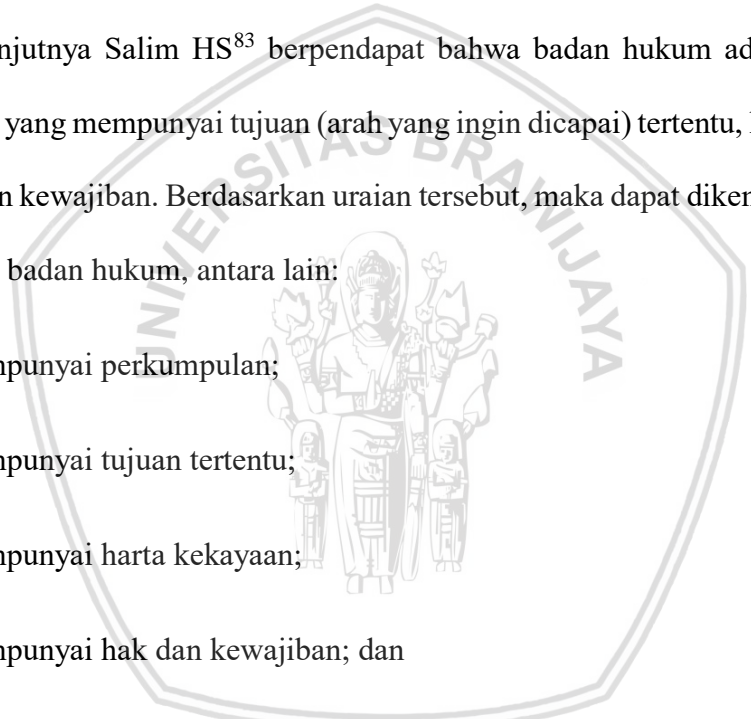
⁸⁰ CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, *Op.Cit.*, hlm 216.

⁸¹ Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary**, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm 1178.

hukum tertentu dari manusia; makhluk, nyata atau imajiner, yang dengan tujuan hukum diperlakukan kurang lebih sebagai manusia)”

Menurut Sri Soedewi Masjchoen,⁸² bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS⁸³ berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- 
- (1) mempunyai perkumpulan;
 - (2) mempunyai tujuan tertentu;
 - (3) mempunyai harta kekayaan;
 - (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
 - (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai

⁸² Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

⁸³ *Ibid.*,

kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota- anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian- perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.⁸⁴

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

⁸⁴ Riduan Syahrani, **Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts•bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu:⁸⁵

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Mengenai bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 71.

berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.⁸⁶

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan:

“Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”

Kemudian pasal 45 KUH Dagang menyatakan :

- (1) “Tanggungjawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.
- (2) “Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya”.

Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang

⁸⁶ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 64

bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Dus badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatige daad*), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli-ahli hukum, seperti Paul Scholten.⁸⁷

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi Badan Hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara) Yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara) Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.⁸⁸

Dalam hal pelaksanaan pengumpulan sumbangan melalui program *crowdfunding*, maka badan hukum yang paling tepat untuk platformer/penyalur yakni Yayasan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang

⁸⁷ Riduan Syahrani, *Ibid.*, hlm 65.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 25.

dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga tujuan yayasan ini dapat dikategorikan lapangan gerak yayasan seperti dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sejalan dengan mekanisme dan tujuan dari *Donation-based crowdfunding* maka Yayasan merupakan badan hukum yang tepat.

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau *non-profit*). Sejalan dengan asas nirlaba, hak yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yayasan tempat kedudukannya adalah bukan perusahaan, karena yayasan kegiatannya tidak menjalankan perusahaan dan tidak mencari keuntungan.⁸⁹

Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang bersal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertent dan mempunyai organ yayasan. Menurutya yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur – unsur :⁹⁰

⁸⁹ Chatamarrasjid Ais, **Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 104.

⁹⁰ *Ibid.*,

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Undang-Undang Yayasan juga telah memperbolehkan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap yayasan yang ingin mendirikan badan usaha hendaknya mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan yang terurai di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha.⁹¹

Lebih jelasnya lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan menyatakan ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak dibenarkan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang

⁹¹ Anwar Borahima, **Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 153.

didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.⁹²

Bagi yayasan dimungkinkan untuk menjalankan badan usaha agar mendapatkan keuntungan dengan cara :⁹³

1. Yayasan dapat mendirikan dan/atau turut serta dalam badan usaha yang kegiatannya sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yakni bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha dengan menanamkan modalnya pada badan usaha lain baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan ketentuan usaha tersebut tidak bertentangan dengan keteriban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal yayasan yang bersifat prospektif dalam suatu badan usaha jumlahnya tidak boleh melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Dengan demikian ada tiga tipe yayasan. Tipe yang pertama, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti bahan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno.⁹⁴

⁹² Rudi Prasetya, **Yayasan Dalam teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 62.

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

Tipe yang kedua, adalah yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari hasil kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkan kegiatan sosialnya.⁹⁵

Tipe yang ketiga, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.⁹⁶

Selain pemisahan harta kekayaan melalui sumber perolehan kekayaan yang lain salah satunya berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan memiliki tujuan yang jelas dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, terdapat sanksi yang jelas terhadap Yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang Yayasan berupa pembubaran Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan, juga menimbang bahwa Yayasan dirasa sebagai badan hukum yang paling tepat karena merupakan badan yang dimaksudkan untuk bergerak dalam bidang filantropis, yaitu kegiatan-kegiatan *non-profit* di bidang sosial dan kemanusiaan. Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial juga membatasi penggunaan dana yang terhimpun agar paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan hasil sumbangan

⁹⁵ Ibid.,

⁹⁶ Ibid.,

program *Crowdfunding* www.kitabisa.com digunakan untuk bantuan medis, atlet dan fasilitas olahraga, infrastruktur Pendidikan dan beasiswa, difabel, umrah dan Haji, Panti Asuhan, Rumah Ibadah dll. Selanjutnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah sumbangan yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.

Namun, mengingat banyaknya kasus penipuan dan pencucian uang berkedok kegiatan sosial, sehubungan dengan itu dalam Undang-Undang Yayasan dikenal adanya Lembaga pemeriksaan terhadap Yayasan, yang fungsinya untuk mengungkap akan terjadinya peristiwa/perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh organ Yayasan. Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Yayasan terdapat beberapa alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan jika terdapat dugaan bahwa organ Yayasan melakukan perbuatan berupa :

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Kemudian dalam Pasal 49 Undang-Undang Yayasan mewajibkan Yayasan untuk membuat laporan sebagaimana bunyi Pasal 49 yakni :

- “(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
- (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.”

Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa :

- 1) “Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- 2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *12711 wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- 3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- 4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- 5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.”

Dengan demikian, menguatkan kepastian hukum terhadap Yayasan selaku badan hukum yang menaungi kegiatan pengumpulan dana melalui program *crowdfunding*.

Selanjutnya dalam hal Lembaga Pemerintahan yang berwenang dalam pengaturan *Donation-based Crowdfunding*, seperti sebelumnya yang sempat dijelaskan dalam urgensi pengaturan *Donation-based Crowdfunding*, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang

atau Barang, Kementerian Sosial memiliki wewenang dalam mengawasi dan memberikan izin terkait pengumpulan uang atau barang dengan skala nasional atau yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dan merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa di Jakarta Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial untuk mengawasi dan menetapkan kebijakan atas kegiatan tersebut. Selain itu dalam UU OJK mengamanatkan kepada OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Mengingat *crowdfunding* adalah salah satu bentuk dari *Financial Technology* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana OJK sebagai badan yang mengawasi transaksi, dana yang mengendap dan informasi baik donator maupun penyelenggara sehingga tidak terjadi kriminalitas seperti pencucian dana, dana mengendap, atau penipuan donasi. Maka pengawasan terhadap dana yang terhimpun melalui pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *crowdfunding* merupakan wewenang OJK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Donation-based Crowdfunding hadir dengan konsep dan mekanisme pembiayaan gotong-royong dengan memanfaatkan perkembangan *financial technology* sehingga mencerminkan pribadi bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 juga menyebutkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Melalui pengumpulan sumbangan dari masyarakat dengan mengaplikasikan program *Donation-based Crowdfunding*, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling bergotong-royong demi menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Namun, berbagai kekaburan serta kekosongan hukum membuat keberjalanan *Donation-based Crowdfunding* Platformer membatasi kategori proyek yang dapat dilakukan serta menentukan syarat dan ketentuan sepihak tanpa ada standarisasi keamanan yang jelas, maka dibutuhkan peraturan perundangan khusus yang mengatur *Donation-based Crowdfunding*. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang baik itu langsung maupun tidak langsung mengatur ciri-ciri dari *Donation-based Crowdfunding* namun tidak

secara menyeluruh, diperlukan sinergisitas berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundangan khusus untuk mengatur *Donation-based Crowdfunding* agar tidak terjadi benturan hukum. Selain itu, permasalahan hukum yang dapat timbul dalam pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui program *Donation-based Crowdfunding* adalah terjadinya kasus penipuan berkedok pengumpulan sumbangan serta pencucian dana kerap terjadi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan sosial. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, maka harus dibentuk suatu peraturan dengan mempertimbangkan nilai aturan yang ada guna menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan Undang-undang yang mengatur khusus terhadap standarisasi prosedur dan registrasi *Donation-based Crowdfunding* yang tidak hanya berupa keputusan (*beschikking*) tetapi juga peraturan (*regeling*) dari pihak-pihak dan lembaga terkait yang secara langsung termasuk dalam wewenangnya dan tidak hanya terbatas dalam kementerian sosial saja seperti yang terjadi saat ini.
2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan *financial technology* serta setiap pihak atau lembaga baik keuangan maupun yang bersifat mengumpulkan dana masyarakat, dapat menetapkan peraturan yang berkaitan dengan *donation-based crowdfunding* mengenai tata cara uang yang dihimpun serta keamanan

informasi dan transaksi untuk semua pihak yang turut serta dalam *donation-based crowdfunding* terutama pihak donator dan penyelenggara donasi.

3. *Donation-based Crowdfunding* secara dilihat dari tujuannya bergerak di bidang sosial, maka Kementerian Sosial sebagai lembaga yang berwenang mengatur hal-hal terkait sosial, dapat menetapkan peraturan dalam hal prosedur pengumpulan dana serta kejelasan tujuan dana yang akan disalurkan.
4. Diperlukan adanya Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) khusus untuk *Crowdfunding* dengan sub-bagian *Donation-based Crowdfunding*, sehingga sebuah *Donation-based Crowdfunding* baru dapat memperoleh izin sub-bagian dari KLU ini apabila telah menyelesaikan perizinan dari otoritas terkait yang dalam hal ini Kementerian Sosial serta Kementerian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 , Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 310/HUK-PS/2018 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa Di Jakarta Selatan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017

BUKU

A. Hamid S. Attamimi, **Dari Perkuliahan Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Anwar Borahima, **Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary**, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn, 2004.

Budi Agus Riswandi, **Aspek Hukum Internet Banking**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), **Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia**, Jakarta, Yayasan Obor. Catur C Rahayu, Penggalangan Dana Model Crowdfunding di Indonesia, UI Press, Jakarta, 2014

Chatamarrasjid Ais, **Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

- Clark, Bill, *The history & evolution of crowdfunding*, Mashable, 2011.
- E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Fernando Manulang, **Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Frans Magnis Suseno, **Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Freedman, David M. and Nutting, Matthew R., *A Brief History of Crowdfunding*, Friedman and Nutting, 2015.
- H. Aziz Syamsuddin, **Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hadinoto, Soetanto, **Kunci Sukses Kredit Mikro**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo, **Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah**, Kencana, Jakarta, 2009.
- Hemer, Joachim. *A snapshot on crowdfunding*, Karlsruhe, Franhoufer, 2011
- Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI**, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.
- Koren, Gijsbert, *A history of crowdfunding*, Smarter Money. 2010
- Mandala Manurung, Prathama Rahardja, **Teori Ekonomi Mikro Edisi Kedua**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2004.
- Manullang, E.Fernando M., **Menggapai Hukum Berkeadilan**, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.
- Muhammad Yunus, *Banker to the Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus, Founder of Grameen Bank*, Oxford University Press, 2001.
- Moh. Mahfud M.D, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Panca Usaha, **Paket Kebijaksanaan**, BP. Panca Usaha, Jakarta , 1993.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

R. Ali Rido SH, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, PT Alumni Bandung, 2004.

Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 1985.

Rudi Prasetya, **Yayasan Dalam teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Suseno, Franz Magnis, **Etika Politik**, PT Gramedia, Jakarta, 1998.

Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008.

JURNAL

Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S. (2017). *Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-10 (July). Canada : Bank of Canada.

Ajeng Radyati, **Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan di Indonesia**, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/678/665>

Ashari, **Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya**, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4: Jakarta, 2006

Catur, **Penggalangan Dana Model "Crowdfunding" di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

Financial Stability Board (FSB, 2017a). *FinTech credit : Market structure, business models and financial stability implications*.

Financial Stability Board (FSB, 2017b). *Financial stability implications from fintech*.

Griffoli, T. M. (2017). *Banking on change. Finance & Development (September)*, Vol. 54, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds.

Microcredit Summit, *The Microcredit Summit Report*, REF, Washington DC, 1997

Tata Wijayanta, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas GadjahMada, Vol. 14 No.2 Mei 2014, (online).
<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=287908>

INTERNET

